



STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA MUKAPAYUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Rizkha Nidawati¹⁾, Agustina Setiawan²⁾, Noer Apptika Fujilestari³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat". Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk mengatahui, mendeskripsikan, serta menganalisis Strategi Pemerintah Desa Dalam pengembangan Desa Wisata Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data studi pustaka, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hasil penelitian yang peneliti temukan menunjukan bahwa strategi pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Mukapayung dalam dimensi menciptakan nilai publik belum optimal, dapat dilihat belum adanya target Desa Wisata secara jelas dari tahun ke tahun. Dalam dimensi legitimasi dan dukungan lingkungan belum optimal, dilihat dari tidak adanya kebijakan khusus yang mengatur Desa Wisata secara jelas. Dalam dimensi kapasitas operasional belum berjalan optimal, dapat dilihat dari kurangnya pemahaman, dukungan anggaran dan dukungan pemerintah daerah. Simpulan yang dapat diambil kurang optimalnya Strategi Pemerintah Desa Mukapayung terhadap pengembangan Desa Wisata Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: Desa Wisata, Pengembangan, Strategi Pemerintah

Abstract

This research is entitled "Village Government Strategy in Developing Mukapayung Tourism Village, Cililin District, West Bandung Regency". The researcher's objective in conducting this research is to know, describe, and analyze the Village Government Strategy in developing Mukapayung Tourism Village, Cililin District, West Bandung Regency. The research method is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques are literature studies, field studies (observation, interviews, and documentation). The results of the research that the researcher found indicate that the village government's strategy in developing Tourism Villages in Mukapayung Village in the dimension of creating public value is not optimal, as can be seen from the absence of clear Tourism Village targets from year to year. In the dimension of legitimacy and environmental support it is not optimal, as seen from the absence of specific policies that clearly regulate Tourism Villages. In the dimension of operational capacity it has

not run optimally, as can be seen from the lack of understanding, budget support and support from the local government. The conclusion that can be drawn is that the Mukapayung Village Government Strategy for the development of Mukapayung Tourism Village, Cililin District, West Bandung Regency is less than optimal.

Keywords: *Tourism Village, Development, Government Strategy*

PENDAHULUAN

Permasalahan umum yang terjadi di Indonesia mengenai pengangguran yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, khususnya penduduk desa yang pindah ke kota karena mata pencaharian. Kota menjadi tempat yang memiliki banyak peluang dalam kesempatan kerja sebagai mata pencaharian dan memungkinkan penghasilan yang lebih tinggi karena berbagai sektor lebih berkembang di kota mulai dari industri, pelayanan, perdagangan, dan lainnya.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor penduduk desa yang beralih ke kota atau yang sering kali disebut urbanisasi untuk mencari pekerjaan dan stabilitas ekonomi yang lebih baik (Mariyadi, 2024). Dampak urbanisasi bagi masyarakat desa salah satunya menyebabkan perekonomian desa tidak berjalan karena tidak ada masyarakat yang berkontribusi dan membangun perekonomian di desa. Oleh karena itu, adanya Desa Wisata diharapkan mampu mengurangi perpindahan penduduk desa ke kota karena potensi yang ada di desa dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Desa Mukapayung merupakan salah satu desa wisata di kabupaten bandung barat yang memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan bagi perekonomian masyarakat, desa Mukapayung memiliki bentangan alam yang indah dan sumber daya alam yang melimpah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata, menyebutkan dalam pasal 6 bahwa pengembangan Desa Wisata salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui terbukanya peluang dan lapangan kerja, peluang dan lapangan usaha baru, serta meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada. Melihat penduduk desa Mukapayung yang memiliki jumlah keluarga pra sejahtera yang masih cukup tinggi sekitar 1.434 keluarga dari 4.219 jumlah keluarga. Keluarga pra sejahtera itu sendiri merupakan

keluarga belum mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan peribadatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dalam (Taryadi & Yunianto, 2022). Maka terbentuknya desa Mukapayung sebagai desa wisata melalui surat keputusan nomor: 188.45/Kep. 86-Disparbud/2019 merupakan salah satu tujuan pemerintah desa dalam membantu perekonomian masyarakat.

Desa wisata Mukapayung merupakan desa wisata yang memiliki beragam wisata mulai dari wisata alam, wisata sejarah, dan wisata buatan. Namun permasalahan yang ada di lapangan menjadi hambatan tujuan adanya desa wisata. Permasalahan desa wisata Mukapayung meliputi tidak adanya kebijakan pemerintah desa yang mengatur mengenai desa wisata, infrastruktur yang meliputi aksesibilitas dan amenita sebagai pendukung pariwisata tidak terpenuhi dengan baik, promosi wisata yang masih kurang, tidak adanya hubungan kerjasama, dan tidak adanya standarisasi Desa Wisata sehingga pengembangan tidak teratur.

Menghadapai beberapa tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana strategi pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata Mukapayung. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata khususnya bagi pemerintah desa Mukapayung dalam mengembangkan desa wisata berkelanjutan dan membantu perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan. Maka dari itu berdasarkan penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat".

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Moore dalam (Muhammad, 2020); ia mengemukakan bahwa strategi pemerintah memiliki tiga komponen yang harus di penuhi. Strategi tersebut antara lain:

1. *Public Value Outcome* (Menciptakan Nilai Publik)
2. *The Authorizing Environment* (Legitimasi dan Dukungan Lingkungan)
3. *Operational Capacity* (Kapasitas Operasional)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan mengambil keputusan dan verifikasi. Alat yang digunakan buku catatan, perekam suara (handphone), kamera, flashdisk, alat tulis dan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi dan instrumen pendukung lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini informan melakukan dan menentukan sumber-sumber informasi atau narasumber yang mengetahui tentang semua permasalahan yang terjadi dengan data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa aparatur dari Pemerintah Desa meliputi Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur Perencanaan desa, Kelompok Sadar Wisata Desa Mukapayung, Perwakilan Mayrakarat Desa Wisata Mukapayung, Perwakilan Pengelola Destinasi Wisata Mukapayung, dan Pelaku UMKM.

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat

Dalam pembahasan ini, peneliti mendeskripsikan mengenai Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan yang telah peneliti lakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Moore dalam (Muhammad, 2020) yang menyatakan bahwa dalam strategi pemerintah penting untuk memperhatikan 3 hal, yaitu:

Menciptakan Nilai Publik (Public Value)

Menciptakan Nilai Publik (Public Value), dalam hal ini di artikan pemerintah desa diharuskan berfikir inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Pemerintah desa harus memiliki tujuan dan maksud program yang jelas, serta menetapkan sasaran dan misi dari program secara tepat. Visi dan misi dibuat oleh seorang pemimpin dengan melihat permasalahan dan potensi yang ada di daerahnya. Desa Mukapayung

memilik potensi sumber daya alam yang dapat di jadikan wisata yang kemudian ditujukan untuk dapat membantu perekonomian masyarakatnya.

Kepala desa Mukapayung memiliki visi TARTIB yaitu (transparan, amanah, ramah, tanggungjawab, inovatif, berwibawa), inovatif merupakan salah satu visi yang mendorong pengembangan desa wisata yang memiliki arti bahwa pemerintah desa dapat mengeluarkan gagasan baru dalam menggali potensi sumber daya manusia dan alam sebagai salah satu solusi permasalahan ekonomi dan salah satu misinya yang mendukung desa wisata adalah memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat dengan salah satunya penataan sumberdaya alam yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi SDA yang ada di Desa Mukapayung menjadi sumber pendapatan asli desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Visi kepala desa di representasikan dalam misi yang di capai melalui program desa wisata. Program dan kegiatan tersebut meliputi pembinaan atau penyuluhan kelompok pemuda tentang Desa Wisata dan ekonomi, pelatihan dan pemberdayaan kelompok UMKM, pelatihan dan pemberdayaan kelompok perempuan dalam ketahanan ekonomi, pelatihan dan pemberdayaan perempuan tentang keahlian tata boga, pembinaan karang taruna wilayah dalam bidang Desa Wisata dan ketahanan ekonomi, pelatihan menjahit bagi warga dalam rangka ketahanan ekonomi, dan pelatihan budidaya lebah madu.

Program dan kegiatan desa wisata dalam pelaksanaanya sudah terlaksana dan masih berlangsung setiap tahunnya, dalam pelaksanaanya dilaksakan oleh pemerintah desa dan pokdarwis. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan sebagaimana dengan adanya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa bahwa pemerintah desa memiliki wewenang menyelenggarkan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa dengan salah satunya mengembangkan sumber pendapatan desa. Namun disamping visi misi dan programnya, sasaran/target desa wisata Mukapayung belum jelas. Pemerintah desa Mukapayung belum memiliki target arah desa wisata secara jelas dari tahun ke tahun nya.

Legitimasi dan Dukungan lingkungan (*The Authorizing Environment*)

Dalam menciptakan Desa Wisata yang berkelanjutan perlu didukung kebijakan sebagai bentuk legitimasi yang sejalan dengan kebutuhan. Pemerintah desa Mukapayung tidak memiliki kebijakan secara khusus mengenai desa wisata. Tidak adanya kebijakan yang mengatur mengenai desa wisata dan tidak adanya anggaran yang dialokasikan ke dalam bidang pariwisata karena sedang diprioritaskan kepada bidang lain, hal ini membawa dampak yang menghambat dalam perkembangan desa wisata.

Dampak tidak adanya kebijakan yang mengikat menjadikan desa wisata lemah dalam pelaksanaanya. Desa wisata Mukapayung tidak memiliki ticketing di lapangan secara resmi, tidak adanya anggaran khusus untuk bidang pariwisata begitupun tidak ada anggaran khusus untuk pokdarwis sebagai organisasi yang di beri wewenang oleh pemerintah desa dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dari aset desa. Hal tersebut tentu tidak akan dapat menarik kedalam pendapatan asli desa dari bidang pariwisata sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan desa wisata.

Desa Wisata perlu dikelola dengan baik bukan hanya secara umum saja namun perlu mendapat perhatian khusus. Tidak adanya kebijakan yang mengikat secara khusus dan tidak adanya sasaran secara jelas bedampak pada jumlah kunjungan wisatawan yang minim yang kemudian berdampak pula kepada produk wisata yang dihasilkan oleh pelaku UMKM.

Selanjutnya, Desa Wisata berlandaskan pada kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat yang perlu dijaga keasliannya dan dilestarikan, karena pada dasarnya roh utama Desa Wisata adalah kearifan lokalnya yang bernilai unik dan menarik. Maka dari itu partisipasi masyarakat dalam membangun desa wisata sangat di perlukan. partisipasi masyarakat terhadap Desa Wisata sebagian besar sudah cukup mendukung keberadaan Desa Wisata, karena masyarakat yang sudah sadar bahwa desanya adalah Desa Wisata dari pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama pokdarwis.

Partisipasi masyarakat terhadap desa wisata terlihat dari antusias masyarakat dalam ikut serta program dan kegiatan desa wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan pokdarwis. Kegiatan yang

dilaksanakan tersebut meliputi pelatihan dan pemberdayaan kelompok UMKM, pelatihan dan penyuluhan kelompok pemuda tentang desa wisata, pelatihan dan pemberdayaan perempuan, pembinaan karang taruna tenang desa wisata, pelatihan menjahit dan budidaya madu, kegiatan mikanyaah munding, trekking, dan festival-festival salah satunya festival kuliner. Masyarakat yang sadar lebih terbuka mengedepankan manfaat Desa Wisata terhadap perekonomian, namun di sisi lain sebagian masyarakat yang belum mendukung masih tertutup dalam perkembangan di bidang wisata.

Dilaksanakan nya pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat terutama kepada pelaku UMKM penjualan secara online dan pemesanan memberikan dampak yang baik dalam perekonomian, namun secara langsung tidak ada wadah dalam menampung produk wisata karena tidak adanya pusat oleh-oleh di desa wisata Mukapayung. Selain itu, desa wisata Mukapayung memiliki wisata yang dimiliki oleh pribadi yaitu wisata Lembah Curugan Gunung Puteri. Sebelum memasuki masa covid-19 banyak wisatawan yang berkunjung ke wisata ini, pemilik wisata pribadi memperbolehkan masyarakat untuk berjualan di area wisata dalam rangka membantu perekonomian masyarakat. Namun masa covid-19 berlangsung sedikitnya pengunjung hingga sampai saat ini dan ketidak tertiban masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, membawa dampak tidak diberi izin bergadagang kembali di area wisata

Kapasitas Operasional (*Operational Capacity*)

Kapasitas operasional berbicara mengenai kemampuan pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata, dimana pemerintah desa tidak sendiri namun melibatkan kerjasama dengan pokdarwis, masyarakat, dan pemerintah derah dalam pengembangan desa wisata. Dalam hal ini pemerintah desa harus bisa mengelola dan mengembangkan desa wisata untuk memberikan kesejahteraan masyarakat melalui meningkatkan perekonomian masyarakat. Semakin besar kapsitas yang dimiliki pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata semakin besar pula dampak atau manfaat yang dapat diambil.

Dalam hal ini sumber daya manusia menjadi kunci utama mewujudkan tujuan di bentuknya desa wisata. Dari segi kuantitas sumber daya manusia dalam mengembangkan desa wisata belum ideal, desa Mukapayung hanya memiliki 4 anggota yang aktif dari jumlah 10 anggota pokdarwis yang memiliki wewenang dalam mengembangkan desa wisata. Sementara itu, kualitas pokdarwis membawa perubahan baik dari terbentuknya pokdarwis di tahun 2022.

Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan tidak adanya kebijakan berdampak pada standarisasi desa wisata yang perlu di perhatikan, dalam hal ini melihat kualitas sumber daya manusia belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari tidak adanya data tertulis dan koordinasi antara pokdarwis dan pemerintah desa mengenai jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan perlu di perhatikan untuk evaluasi dan membentuk strategi dalam menaikan jumlah kunjungan wisatawan dari berbagai aspek.

Namun disisi lain, okdarwis membawa berbagai penghargaan desa wisata mulai dari juara 1 vido explore dan produk unggulan Kabupaten Bandung Barat, piagam penghargaan dari Kemenparekraf sebagai peserta desa binaan, dan piagam penghargaan dari Disparbud Jawa Barat sebagai 18 besar Desa Wisata terbaik di Jawa Barat. Dengan salah satu maksud memperkenalkan desa wisata Mukapayung kepada wisatawan luas. Dalam menjalankan kewenangannya pokdarwis juga melaksanakan program dan kegiatannya meliputi ngamumule budaya sunda, festival kuliner, festival kopi, dan trekking. Dalam usahanya pokdarwis memperkenalkan desa wisata ke wisatawan luas tidak membawa dampak yang signifikan dalam menarik wisatawan, dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 4.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2022-2023

No .	Nama Daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	
		2022	2023
1.	Kabupaten Bandung Barat	4.469.184	3.480.347
2.	Desa Mukapayung	1.946	2.866

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2024

Tabel diatas memperlihatkan bahwa desa wisata Mukapayung pada tahun 2022 hanya mampu menyerap 1.946 wisatawan dari 4.469.184 wisatawan yang berwisata di kabupaten bandung barat dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menyerap 2.866 wisatawan dari 3.480.347 wisatawan yang berwisata di Kabupaten Bandung Barat. Walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2023 namun wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Mukapayung masih belum optimal.

Promosi wisata merupakan hal yang di perlukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, melihat pada zaman sekarang teknologi informasi semakin pesat maka promosi di media sosial sangat penting. Desa wisata Mukapayung melakukan promosi yang dilakukan pemerintah desa bersama pokdarwis berupa promosi dengan membuat konten video yang di tampilkan di youtube dan instagram saja tidak mencakup semua media sosial dan tidak melakukan promosi kolaborasi endorsement, dimana hal tersebut belum cukup untuk menyebarkan informasi dan menarik wisatawan secara luas karena adanya keterbatasan anggaran.

Selanjutnya kemampuan kerjasama pemerintah desa dan pokdarwis juga tidak kalah penting. Adanya kerjasama antar sektor dapat menciptakan sinergi yang mendorong Desa Wisata lebih baik dengan memecahkan kebutuhan, mengatasi hambatan, dan menciptakan solusi yang inovatif. Selain itu dengan terjalinnya kerjasama dengan baik dapat meningkatkan akses Desa Wisata ke pasar dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Namun desa wisata Mukapayung tidak memiliki kerjasama yang terjalin dengan pihak lain. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan kerjasama pemerintah desa dan pokdarwis belum optimal.

Menciptakan keberhasilan dan keberlanjutan Desa Wisata perlu ditunjang dengan kemampuan pemerintah desa dan peran pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur desa wisata yang baik untuk memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat dan kenyamanan wisatawan yang berwisata. Infrastruktur Desa Wisata yang dimaksud meliputi jalan, transportasi, fasilitas umum seperti toilet dan tempat ibadah, pusat informasi, restoran, dan pusat oleh-oleh. Infrastruktur yang lengkap dan baik

memudahkan wisatawan untuk mencapai tempat wisata dengan aman, selain itu infrastruktur yang memadai juga memudahkan wisatawan berwisata dengan nyaman dan menjadi kepuasan wisatawan.

Jalan menjadi aksesibilitas yang pasti di lewati oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-harinya dan di lewati wisatawan untuk menuju tempat wisata. Jalan untuk menuju tempat wisata memiliki kondisi yang rusak sulit untuk dilalui merupakan jalan kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang menjadi permasalahan Desa Mukapayung, dalam hal ini dukungan pemerintah daerah sangat di butuhkan. Pemerintah desa dalam hal ini sudah bertindak dalam setiap tahunnya menyampaikan kepada pemerintah daerah namun tidak kunjung respon. Selain jalan pusat informasi, pusat oleh-oleh, dan fasilitas umum seperti toilet belum tersedia di Desa Wisata Mukapayung. Dalam kemampuan membangun infrastruktur pemerintah desa Mukapayung masih belum optimal.

KESIMPULAN

Dalam mengembangkan desa wisata pemerintah desa perlu merencanakan dan melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan desa wisata berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang desa. Sesuai dengan visi kepala desa yaitu TARTIB (transparan, amanah, ramah, tanggung jawab, inovatif, berwibawa) inovatif yang mengandung arti menghasilkan ide gagasan baru dalam menggali potensi sumber daya manusia dan alam, dengan salah satu misinya yaitu memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat dengan tujuan kedepannya diharapkan dapat menarik ke dalam pendapatan asli desa dan mendukung perekonomian masyarakat. Pemerintah desa membentuk program dan kegiatan desa wisata yang dalam pelaksanaanya terlaksana dengan baik oleh pemerintah desa dan pokdarwis. Partisipasi masyarakat sebagian besar cukup antusias dengan adanya desa wisata ini. Namun permasalahan yang ada dilapangan, bahwa desa Mukapayung tidak memiliki kebijakan secara khusus dalam mengatur desa wisata dan dalam pengembangan desa wisata masih dilaksanakan secara umum saja, tidak di alokasikan anggaran ke bidang pariwisata sehingga dalam pelaksanaanya tidak berkembang. Dampak dari keterbatasan anggaran dan tidak adanya kebijakan yaitu promosi kurang optimal, infrastruktur yang sangat terbatas, tidak ada standarisasi desa wisata, dan kemampuan kerjasama yang masih belum optimal. Kekurangan yang ada berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan yang minim yang kemudian akan berdampak pula kepada perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mariyadi. (2024, Agustus Senin). *Beberapa Faktor Pendrong Perpindahan Penduduk Dari Desa Ke Kota. Opgehaald van Up Desa:* <https://updelsa.colm/faktolr-pelndolrolng-pelrpindahan-pelnduduk-dari-delsa-kel-kolta/>
- Muhammad, R. (2020). *Manajemen Stratejik Sektor Publik*. Makasar : University Press.
- Taryadi , B., & Yunianto. (2022). *Klasterisasi Data Keluarga Pra Sejahtera Di Kota Pekalongan Dengan Metode K-Means Clustering*. Jurnal Litbang Kota Pekalongan , 70-76.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2024
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata
- Surat Keputusan Nomor: 188.45/Kep. 86-Disparbud/2019 Tentang Terbentuk Desa Wisata Mukapayung